

Kode>Nama Rumpun Ilmu\* : 562/ Akuntansi

**LAPORAN AKHIR PENELITIAN DOSEN PEMULA  
DANA DIPA BOPTN PNP**



**"Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak  
(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang *Listing*  
di Bursa Efek Indonesia)"**

**Tim Pengusul :**

Dedy Djefris, SE., M.Ak., Ak      Ketua Peneliti  
Eliyanora, SE., M.Ak., Ak      Anggota

(NIDN : 0023126903)

(NIDN : 0009037203)

**POLITEKNIK NEGERI PADANG  
DESEMBER 2017**

**HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR  
PENELITIAN DOSEN PEMULA**

**Judul Penelitian** : Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di Bursa Efek Indonesia)

**Kode>Nama Rumpun Ilmu** : 562/ Akuntansi

**Ketua Peneliti**

**Nama Lengkap** : Dedy Djefris, SE.M.Ak Ak

- a. NIDN : 0023126903
- b. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
- c. Program Studi : Akuntansi
- d. Nomor HP : 081374878378
- e. Alamat surel (e-mail) : dedy.djefris@gmail.com

**Nama Lengkap** : Eliyanora, SE.M.Ak Ak

- a. NIDN : 0009037203
- b. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
- c. Program Studi : Akuntansi

**Biaya Penelitian Keseluruhan** : Rp 7.000.000,-

**Penelitian Tahun ke-** : 1 dari rencana 1 tahun

- diusulkan ke DRPM Rp .....
- dana internal PT Rp .....
- dana institusi lain Rp ..... / *in kind* tuliskan: .....

Padang, 4 Desember 2017

Mengetahui,  
Ketua Jurusan



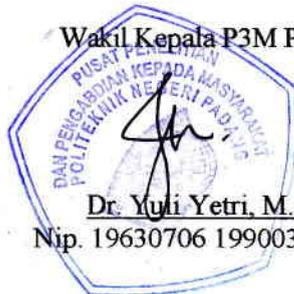
Sukartini, SE.M.Kom.Ak  
Nip. 197302252001122001  
Menyetujui,

Ketua Peneliti,



Dedy Djefris, SE.M.Ak.Ak  
Nip. 19711226200031001

Wakil Kepala P3M PNP



Dr. Yuli Yetri, M.Si  
Nip. 19630706 199003 2 002

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Sektor pajak bisa dikatakan sebagai lumbung padi suatu negara. Hal ini dikarenakan besarnya jumlah pajak yang bisa dipungut dari wajib pajak. Dalam prakteknya, pemungutan pajak yang dilakukan Pemerintah memiliki kendala diantaranya adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan Pemerintah. Selain itu *tax avoidance* terjadi karena memanfaatkan celah yang terdapat dalam perbedaan peraturan menurut perpajakan dan menurut standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. *Tax avoidance* bukan berarti tidak membayar pajak namun meminimalisir beban pajak, salah satu cara untuk mengukur seberapa baik perusahaan mengelola pajaknya dengan menggunakan *Book Tax Differences* (BTD) (Pohan, 2008).

Untuk melakukan *tax avoidance* ini dibutuhkan peran dari struktur organisasi. Dimana struktur organisasi merupakan pengelola perusahaan. Merekalah yang tau bagaimana situasi dan keadaan di dalam perusahaan. Untuk itu sebagai pengambil kebijakan di perusahaan, harus menjunjung tinggi asas dalam *good corporate governance*. Peran *corporate governance* sebagai struktur dan sistem dalam mendorong kepatuhan manajemen terhadap pembayaran pajak dianggap sangat diperlukan. *Corporate Governance* memiliki andil dalam proses pengambilan keputusan termasuk keputusan perpajakan (Winata, 2014).

Menurut Fadhilah (2014) mekanisme dalam pengawasan *corporate governance* (CG) ada dua yaitu internal dan eksternal. Mekanisme internal adalah cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti rapat umum pemegang saham, komposisi dewan direksi, proporsi dewan komisaris independen, dan pertemuan dengan *board of director*. Sedangkan mekanisme eksternal adalah seperti pengendalian oleh perusahaan, struktur kepemilikan, dan pengendalian pasar. Pengendalian internal tersebut dapat dilakukan oleh organ-organ perusahaan (dewan direksi, komisaris independen, komite audit), sedangkan untuk pengendalian eksternal dapat dilakukan oleh pemilik perusahaan yang dilihat dari seberapa besar jumlah kepemilikan saham.

Terdapat beberapa peneliti yang menguji pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance* diantaranya Ariawan dan Setiawan (2017) mengambil variabel komisaris